OMBUDSMAN DUKUNG KOMITMEN POLDA SUMBAR CEGAH PUNGLI DI SAMSAT

Senin, 21 April 2025 - sumbar

Padang (ANTARA) - Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) mendukung komitmen Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) untuk mencegah praktik pungutan liar atau Pungli di pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

Hal itu dinyatakan oleh Kepala Ombudsman Sumbar Adel Wahidi usai menerima menerima kunjungan kerja dari Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar yang baru yakni AKBP H M Reza Chairul Akbar Siddiq di Kantor Ombudsman, pada Kamis.

"Ombudsman mendukung komitmen dari Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar yang mencegah terjadinya peluang praktik pungutan liar," kata pria yang akrab disapa Adel.

Ia mengatakan dalam pertemuan itu AKBP Reza menyampaikan bahwa dirinya akan melakukan pembenahan terhadap sistem dan meningkatkan kualitas pelayanan di Samsat.

Salah satunya adalah terkait hasil temuan Ombudsman Sumbar ketika melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Samsat Padang usai Lebaran Idul Fitri lalu pada Selasa (8/4).

Ombudsman menemukan dugaan praktik pungli pada bagian penggesekan cek fisik kendaraan yang dilakukan sebelum pembayaran pajak kendaraan, dengan besaran mencapai lima sampai sepuluh ribu rupiah.

Padahal di lokasi tersebut telah terpasang spanduk yang menyatakan bahwa penggesekan fisik kendaraan gratis atau tidak dipungut biaya apapun.

Terhadap persoalan itu Reza sebagai pejabat utama di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar menyatakan akan pro aktif guna menutup celah pungli.

Ia telah memerintahkan jajaran untuk menempatkan petugas resmi di layanan penggesekan cek fisik kendaraan sebagaimana saran dari Ombudsman Sumbar.

Selain itu pihaknya juga akan menempatkan petugas resmi dengan penampilan yang baik serta seragam sehingga akan lebih mudah kita kontrol.

Kepolisian menyatakan layanan penggesekan fisik kendaraan itu gratis bagi masyarakat, sehingga tidak dibenarkan adanya penerimaan imbalan atau apapun termasuk uang terima kasih.

"Kami polisi akan terus bekerja secara maksimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat Sumatera Barat tanpa praktik pungutan liar dan lainnya," katanya.

Kepala Ombudsman Adel berharap komitmen yang disampaikan oleh Reza itu dapat direalisasikan dengan baik sehingga peningkatan pelayanan publik bisa diwujudkan.

Pihaknya sebagai sebagai lembaga negara yang berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh instrumen pemerintah akan terus melakukan pengawasan serta pemantau secara periodik.

Adel menegaskan bahwa terhadap suatu pelayanan publik yang telah dinyatakan gratis, maka tidak dibenarkan penerimaan dalam bentuk apapun di pelayanan tersebut, baik itu berdalih suka rela ataupun terimakasih.

Namun demikian ia mengapresiasi kedatangan Direktur Lalu Lintas yang baru ke Kantor Ombudsman sebagai bentuk sikap serta komitmen awal dalam mewujudkan perubahan yang lebih baik.

Untuk diketahui, Reza secara resmi baru bertugas sebagai Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar dalam beberapa hari terakhir menggantikan pejabat yang lama yakni Kombes Pol Dwi Nur Setiawan.

Dalam kunjungan ke Kantor Ombudsman itu Reza didampingi oleh tim dan sejumlah perwira serta jajaran dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar.

Pewarta : Fathul Abdi

Uploader: Jefri Doni

COPYRIGHT © ANTARA 2025